



*Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melambaikan tangan*

## **Berantas Mafia Haji, Kementerian Agama Terapkan Jurus Khusus**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**VIVAnews - Kabar** adanya mafia dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia membuat Kementerian Agama gerah. Tidak ingin anggapan publik bergulir liar, Kemenag menggendeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2014, sekaligus membuktikan ada tidaknya mafia ini.

Tidak hanya pengawas eksternal, Kemenag juga mengikutsertakan jajaran internal dari Inspektorat Jenderal untuk terlibat langsung dalam seluruh proses, terutama menyangkut negosiasi harga pemondokan yang menjadi sorotan KPK.

"Jadi tim perumahan, yang selama ini kerja sendiri dalam negosiasi harga, tahun ini didampingi inspektorat jenderal, bahkan BPK dan KPK. Saya tidak lepas lagi mereka sendiri," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis 14 Agustus 2014.

Dengan cara seperti itu, proses negosiasi harga pemondokan untuk ratusan ribu jemaah haji di tanah suci menjadi lebih transparan, sehingga setidaknya mampu menepis anggapan selama ini terkait mafia haji. Berkat pengawasan melekat itu, kata Lukman, pemerintah berhasil melakukan efisiensi lebih dari Rp100 miliar untuk pemondokan haji di Makkah dan sekitar Rp41 miliar untuk pondokan jemaah di Madinah. Sementara efisiensi terkait hotel transit bagi jemaah di Jeddah masih dihitung.

### Mafia Kuota

Tak hanya soal mafia perumahan, Lukman juga menyinggung soal mafia kuota haji. Untuk penyelenggaraan haji reguler yang dilakukan pemerintah, Lukman menjamin tidak ada masalah. Ini bisa dilihat dari sisa kuota haji yang tinggal 551 kursi dari total kuota haji reguler sebanyak 155.200. "Ham-pir 100 persen terserap," kata dia.

Lukman akan terus

mengupayakan agar kuota yang tersisa itu tetap bisa dipakai oleh jemaah yang sudah antres bertahun-tahun, bukan dimanfaatkan oleh kalangan VIP seperti yang selama ini terjadi. Sisa kuota ini akan dikembalikan ke provinsi yang belum memenuhi kuota. Jika tidak terisi jemaah, pihaknya mengupayakan sisa kuota diisi oleh petugas pembimbing haji yang jumlahnya saat ini sangat minim. "Bayangkan sekarang satu pembimbing harus tangani 400 jemaah (satu kloter). Sehebat apapun pembimbingnya pasti kewalahan. Jadi ini paling rasional dibanding diisi pejabat," kata dia.

Jual beli kursi haji, kata Lukman, justru paling rawan terjadi pada jemaah haji non kuota. Jemaah haji non kuota ini biasanya berangkat atas undangan khusus Raja Arab Saudi sebagai pemegang otoritas di tanah suci. Raja memiliki kebiasaan memberi kewenangan kepada kedutaan besar di negara-

memberikan undangan menunaikan ibadah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan. Jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan orang. Kepada Dubes Arab Saudi di Indonesia, Lukman sudah mewanti-wanti agar mereka membrikan daftar orang-orang yang mendapat undangan khusus dari raja. Supaya pemerintah bisa memantau siapa saja yang berhaji non kuota.

"Dengan cara ini saya ingin menghapus calo-calo (mafia), sebab ini berpotensi untuk dijualbelikan. Karenanya saya ingin ajak semua pihak, termasuk media membantu merentas praktik jual beli haji non kuota," kata dia.

Sebab banyak modus, para calo menawarkan kursi haji non kuota kepada calon jemaah namun dengan syarat menyetorkan uang sekian rupiah. "Mereka hanya membeli, menipu. Makanya saya ingin sistem ini (non kuota) dihapus saja," ujar dia. (ren)